

# Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



## LAPORAN KINERJA 2016



Kementerian Pertanian



Jl. Harsono RM No.3 Gedung C, Ragunan - Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 - Indonesia  
Telp : (021) 021 7815580 - 83, 7847319 FAX : (021) 7815583  
Web site : <http://ditjennak.pertanian.go.id/>  
Email : [ditjennak@pertanian.go.id](mailto:ditjennak@pertanian.go.id)

## Kata Pengantar



Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2016.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Februari 2017  
Direktur Jenderal



Ketut Diarmita

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia.....	8
1.5. Dukungan Anggaran .....	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan .....	9
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) .....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
2.3. Perjanjian Kinerja .....	15
2.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKH Tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal .....	16
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .....	17
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis.....	17
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	22
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	42
3.5. Hambatan dan Kendala.....	45
<b>IV. PENUTUP</b> .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016 .....	9
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2016 .....	15
Tabel 4. Produksi daging ternak lainnya tahun 2015-2016 .....	26
Tabel 5. Produksi telur tahun 2015-2016 .....	29
Tabel 6. Capaian produksi susu tahun 2015-2016 .....	31
Tabel 7. Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2012-2016 .....	33
Tabel 8. Jumlah Muatan Ternak Selama Pelayaran Tahun 2016 .....	38
Tabel 9. Penjualan Daging Sapi oleh Penerima Ternak .....	39
Tabel 10. Kronologis Perubahan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016 .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak Tahun 2016.....	18
Gambar 2. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Status Kesehatan Hewan Tahun 2016 .....	19
Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Sertifikasi Ternak dan Produk Ternak	19
Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Ekspor Ternak Babi Tahun 2016 .....	20
Gambar 5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Peternak Tahun 2016 .....	20
Gambar 6. Populasi Ternak Ruminansia Besar Tahun 2012-2016 .....	21
Gambar 7. Populasi Ternak Ruminansia Kecil Tahun 2012-2016 .....	21
Gambar 8. Populasi Ternak Unggas Tahun 2012-2016 .....	22
Gambar 9. Trend produksi daging sapi dan kerbau tahun 2012-2016 .....	23
Gambar 10. Trend Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2012-2016 .....	27
Gambar 11. Trend Produksi Telur Tahun 2012-2016 .....	30
Gambar 12. Trend Produksi Susu Tahun 2012-2016 .....	31
Gambar 13. Trend Jumlah Ekspor Ternak Babi Tahun 2012-2016 .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	48
Lampiran 2. Rekapitulasi SDM Ditjen PKH Tahun 2010-2016 .....	49

## EXECUTIVE SUMMARY

Nawa cita Kabinet Jokowi-JK terkait kedaulatan pangan dan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional merupakan acuan kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu mempertimbangkan pula kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode sebelumnya.

Capaian sasaran strategis Ditjen PKH pada tahun 2016 termasuk kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis delapan indikator yang rata-rata lebih dari 85,90%, dengan kisaran 58,08% – 105,48 %. Indikator yang memiliki capaian >100% adalah produksi susu, peningkatan status kesehatan hewan, dan nilai tukar peternakan. Sedangkan indikator yang capainnya <100% adalah produksi daging sapi/kerbau, produksi daging ternak lainnya, produksi telur, sertifikasi ternak dan produk ternak serta ekspor ternak hidup babi.

Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 sebesar Rp 2,16 triliun. Pada tahun 2016 terjadi penghematan dan self blocking sehingga total anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Rp 1,59 triliun. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1,48 triliun atau 92,30% dari total anggaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain: 1) Kegiatan Pengadaan Indukan Impor Brahman Cross yang awalnya direncanakan 50 ribu ekor, namun terjadi kebijakan penghematan sampai dengan dua kali sehingga yang dapat terealisasi sebanyak 4600 ekor. Saat ini dalam proses distribusi ternak, diharapkan akhir bulan November sudah BAST; 2) Keterlambatan pelaksanaan DIPA APBN-P 2016 Kegiatan Pengembangan Budidaya ternak pada akhir bulan September 2016 : 1) Persiapan baru dimulai Oktober; 2) Proses lelang pada bulan Oktober-November; 3) Proses Kontrak pada bulan November, dan 4) Beberapa satker tidak dapat merealisasikan; 3) Pengembangan Hijauan pakan ternak masih tahap pembuatan pagar, embung, shelter, penanaman HPT; 4) Kegiatan pemenuhan persyaratan produk hewan ASUH, penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan penularan zoonosis di beberapa satker masih proses lelang dan kontrak; dan 5)

Kegiatan pengolahan hasil peternakan terlambat melakukan proses penentuan site manager dan pembentukan SK Kelompok, dan pengadaan barang pada tahap kontrak. Sedangkan kegiatan pengembangan sarana dan kelembagaan pasar beberapa masih tahap lelang.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nawa cita Kabinet Jokowi-JK terkait kedaulatan pangan dan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional merupakan acuan kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu mempertimbangkan pula kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode sebelumnya.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 dapat dilihat dari aspek ekonomi makro serta teknis populasi dan produksi ternak. Dari sisi ekonomi makro yaitu PDB berdasarkan angka konstan meningkat sebesar 3,09%, sementara penyerapan tenaga kerja menurun sebesar 0,75% dibanding tahun 2014. Untuk investasi PMDN turun sebesar Rp. 618.149,2 juta rupiah, sedangkan PMA tumbuh sebesar US\$ 44.310,3 ribu dollar. Kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak (NTP) mengalami peningkatan menjadi 107,69. Sedangkan, pada aspek perdagangan ternak, peternakan dan kesehatan hewan masih mengalami devisa ekspor dibandingkan impor. Ditargetkan pada tahun 2015-2019 PDB sub sektor peternakan meningkat sebesar 3,86% per tahun, penyerapan tenaga kerja meningkat 0,23% per tahun, dan peningkatan investasi 17,26% per tahun.

Sedangkan dari sisi teknis, populasi ternak kurun waktu 2012-2015 rata-rata mengalami peningkatan. Dalam periode yang sama, untuk peningkatan produksi daging, semua jenis ternak juga mengalami peningkatan Pada tahun 2015-2019,

ditargetkan peningkatan populasi rata-rata 4,26% per tahun, peningkatan produksi daging 8,4% per tahun, peningkatan produksi telur 8,9% per tahun, dan peningkatan produksi susu 7,3% per tahun

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 dan memperhatikan capaian aspek ekonomi makro dan aspek teknis populasi dan produksi ternak, maka Ditjen PKH merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut: (1) Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal; (2) Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan; (3) Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis; (4) Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing; (5) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan; (6) Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Mendorong insentif peternakan; dan (9) Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak. Selama kurun waktu tersebut regulasi yang dibutuhkan banyak terkait dengan peraturan daerah yang mengatur: tataruang peternakan dan keswan; pengendalian pemotongan betina produktif; penetapan kawasan peternakan; pengembangan ternak dilahan sawit/hutan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Selain itu akan didorong dan diarahkan badan, instansi dan berbagai perusahaan untuk mengembangkan *Coorporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi maka pada tahun anggaran 2015-2019 Ditjen PKH merumuskan program **Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**. Pemenuhan pangan asal ternak mengarah pada peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu), sedangkan agribisnis peternakan rakyat mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kegiatan utama yang akan diimplementasikan pada tahun 2015-2019 adalah kegiatan produksi bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan ternak, penanganan penyakit hewan menular strategis (PHMS), jaminan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan kegiatan dukungan manajemen teknis.

Pencapaian penyediaan pangan asal ternak juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, baik di pusat maupun daerah, sehingga tercapainya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik

Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan peternak.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap unit kerja diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun.

Laporan kinerja Ditjen PKH tahun 2016 adalah bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal PKH kepada Menteri Pertanian atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adalah tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen PKH selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## **1.3 Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan

kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Masing-masing unit organisasi tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi :
  - (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
  - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
  - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
  - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
  - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
  - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
  
- (2) Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi :

- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
  - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
  - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
  - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
  - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
  - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.
- (3) Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
  - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
  - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
  - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan

hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;

- (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
  - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
- (4) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
  - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
  - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
  - (c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
  - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
  - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
  - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (6) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
- (a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
  - (c) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - (d) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
  - (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **1.4 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah SDM Ditjen PKH tahun 2016 sebanyak 2.185 orang, yang terdiri dari:

- 1) Jumlah pegawai menurut Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal 160 orang, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 72 orang, Direktorat Pakan 54 orang, Direktorat Kesehatan Hewan 78 orang, Direktorat Kesmavet 50 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 51 orang
- 2) Jumlah pegawai pusat dan UPT: Pegawai pusat 467 orang, sedangkan pegawai UPT 1.718 orang
- 3) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV 226 orang, golongan III 1.371 orang, golongan II 542 orang dan golongan I 46 orang
- 4) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 18 orang, S-2 sebanyak 478 orang, S-1/D-4 sebanyak 473 orang, Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 261 orang, SLTA sebanyak 791 orang, SLTP sebanyak 67 orang, dan SD sebanyak 97 orang.
- 5) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 1.383 orang dan perempuan sebanyak 802 orang.

#### **1.5 Dukungan Anggaran**

APBN PKH tahun 2016 awalnya sebesar Rp.2,806 Triliun, karena adanya kebijakan penghematan, sehingga total APBN Ditjen PKH menjadi sebesar Rp 2,160 Triliun. Berdasarkan kewenangan, bobot terbesar anggaran PKH terdapat pada kantor pusat sebesar Rp.826,233 miliar (38,23%), sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp.1,900 Triliun (87,95%), dan berdasarkan jenis kegiatan utama bobot terbesar pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serts Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp.1,203 Triliun (42,90%).



Tabel 1 Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016

(Rp Miliar)

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	32.533	789.080	4.619	826.233
2	Kantor Daerah	117.788	314.276	105.372	537.436
3	Dekonsentrasi	0	242.307	10	242.317
4	Tugas Pembantuan Propinsi	0	426.297	-	426.297
5	Tugas Pembantuan Kabupaten	0	128.635	20	128.655
	Total	150.321	1.900.597	110.021	2.160.941

### 1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang instansi seperti dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi, dan sumber daya serta keunggulan lainnya yang dimiliki;
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini disampaikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program;
- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Ditjen PKH tahun 2015
- 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Ditjen PKH dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2016, Ditjen PKH telah mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2015-2019.

#### Visi

Visi Ditjen PKH dirumuskan sebagai berikut:

*“Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak”*

#### Misi

Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Ditjen PKH akan mengemban Misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
3. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas, Ditjen PKH menentukan Tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak;
3. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;
4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi
6. Meningkatkan kesejahteraan peternak

## **Sasaran**

Sasaran pembangunan Ditjen PKH adalah meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak.

1. Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

## **Kebijakan dan Strategi**

1. Arah dan Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

- a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
  - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
  - 2) Pengembangan pakan ternak;
  - 3) Kesehatan hewan;
  - 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan;
  - 5) Dukungan manajemen kesekretariatan
- b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing  
Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
  - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
  - 2) Pengembangan pakan ternak
  - 3) Kesehatan hewan
  - 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak
  - 5) Penjaminan pangan asal hewan ternak

## 6) Dukungan manajemen kesekretariatan

### 2. Strategi

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah disesuaikan dengan strategi Kementerian Pertanian sebagai nampak pada gambar 3.1 sehingga Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan strategi

- a. Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal
- b. Peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
- c. Penyediaan bahan baku bio industri dan bio energi
- d. Peningkatan pendapatan keluarga petani
- e. Peningkatan kualitas petani dan kelembagaannya
- f. Peningkatan kualitas aparatur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

### **Program dan Kegiatan**

#### 1. Program

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2015 –2019 maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

#### 2. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan, diperlukan langkah operasional sebagai berikut: Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu:

- a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu:
  - 1) Pengembangan populasi sapi dan kerbau
  - 2) Produksi benih sapi dan kerbau
  - 3) Pengembangan populasi kambing dan domba
  - 4) Pengembangan populasi babi
  - 5) Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak
  - 6) Peningkatan produktivitas ternak sapi dan kerbau
  - 7) Penambahan indukan dan pejantan sapi
- b. Peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak akan ditempuh langkah operasional:
  - 1) Pengembangan hijauan pakan ternak
  - 2) Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan
  - 3) Pengembangan mutu dan keamanan pakan
- c. Peningkatan status kesehatan hewan akan ditempuh langkah operasional:
  - 1) Penanganan dan pengendalian PHMSZ
  - 2) Penanganan dan pengendalian penyakit Anthraks
  - 3) Penanganan dan Pengendalian Rabies
  - 4) Penurunan angka kematian ternak
  - 5) Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran
  - 6) Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan
  - 7) Peningkatan volume ekspor obat hewan
- d. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasional:
  - 1) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
  - 2) Penerapan kesejahteraan hewan
  - 3) Pencegahan penularan zoonosis
- e. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan akan ditempuh langkah operasional:
  - 1) Peningkatan fasilitasi UPH peternakan pangan dan non pangan
  - 2) Peningkatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos, dan pupuk cair
  - 3) Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan
  - 4) Perbaikan tata niaga peternakan
  - 5) Peningkatan investasi sub sektor peternakan
  - 6) Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan
  - 7) Penguatan kelembagaan peternakan
- f. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasional
  - 1) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya

## 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP

### 2.2 Indikator Kinerja Utama

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8543/Kpts/RC.010/F/10/2016. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (tahun)			
			2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi pangan asal ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588,56	639,61	695	755
		b. Produksi telur (000 ton)	3.393,36	3.536,86	3.655	3.770
		c. Produksi susu (000 ton)	850,77	910,57	980,88	1.063,56
		d. Produksi daging kambing dan domba (000 ton)	116,97	119,50	122,11	124,81
		e. Produksi daging babi (000 ton)	354,97	375,80	398,09	421,7
		f. Produksi daging unggas (000 ton)	3.206,94	3.301,58	3.449,37	3.621,00
2.	Peningkatan daya saing peternakan	g. Rasio volume ekspor terhadap pertanian strategis (%)	81,10	80,60	80,90	80,60
		h. Penurunan volume impor produk pertanian strategis (%)	-9,2	-18,90	-9,50	-2,9
		i. Jumlah ekspor obat hewan (volume)	3	5	5	5
		j. investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2,5
		investasi sub sektor peternakan PMDN (%)	1	2	2,5	3
		k. Status kesehatan hewan	75	77	79	80
		l. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	63,33	69,18	76,83	84,53
3.	Peningkatan kesejahteraan peternak	m. PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp. Juta)	37,14	39,49	41,83	44,17
		n. Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,23	107,53	107,82	108,12

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2016 Direktur Jenderal PKH menyepakati perjanjian kinerja dengan 8 indikator yang ingin dicapai yaitu: (1) Produksi daging sapi/kerbau; (2) produksi ternak lainnya; (3) produksi telur; (4) produksi susu; (5) peningkatan status kesehatan hewan; (6) jumlah sertifikat; (7) jumlah ekspor ternak hidup babi; dan (8) Nilai Tukar Petani Peternak (NTP). Selengkapnya target indikator kinerja perjanjian kinerja Dirjen PKH Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2016

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	
1	Pemenuhan Pangan Asal Ternak	1)	Produksi daging sapi/kerbau	588.560	Ton
		2)	Produksi ternak lainnya	3.678.667	Ton
		3)	Produksi telur	3.393.360	Ton
		4)	Produksi Susu	850.770	Ton
2	Peningkatan Daya Saing Peternakan	1)	Peningkatan status kesehatan hewan	73	%
		2)	Sertifikasi ternak dan produk ternak	26.000	Buah
		3)	Ekspor ternak babi hidup	35.200	Ton
3	Peningkatan Kesejahteraan Peternak	NTP Peternakan		107,23	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2016

#### **2.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKH Tahun 2016 oleh Inspektorat Jenderal**

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas AKIP Ditjen PKH oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

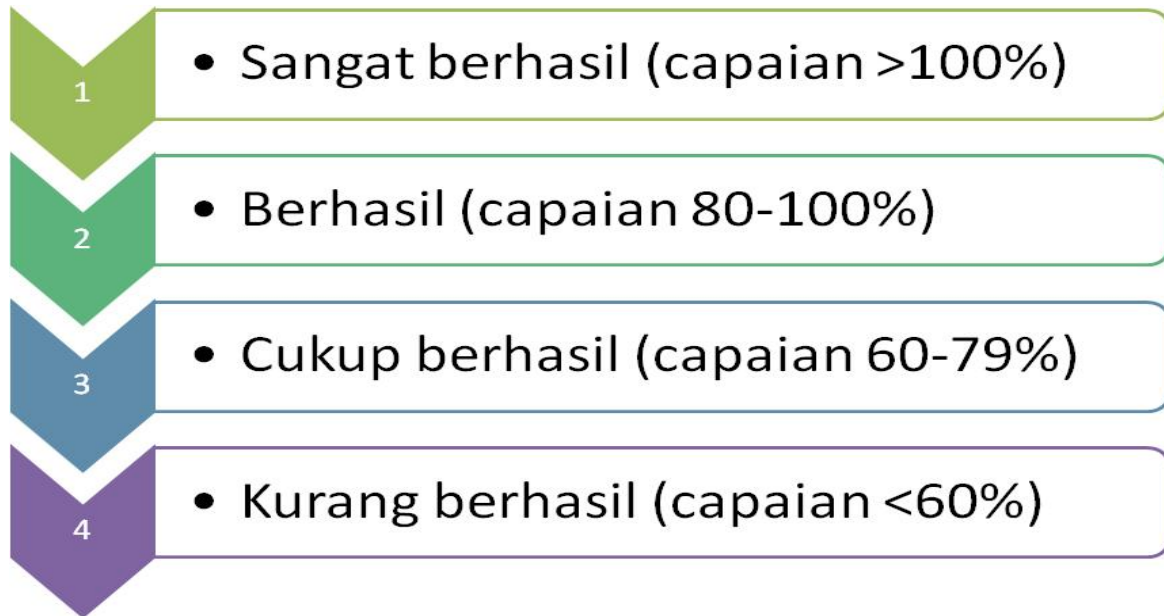
1. Penetapan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PKH dengan Eselon II, Kepala UPT, dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi pada tanggal 2 Februari 2017.
2. Penetapan IKU Ditjen Peternakan dan Keswan melalui surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 8543 Tahun 2016.
3. Penetapan PK pejabat eselon III dan IV tahun 2017 dan 2016



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu:



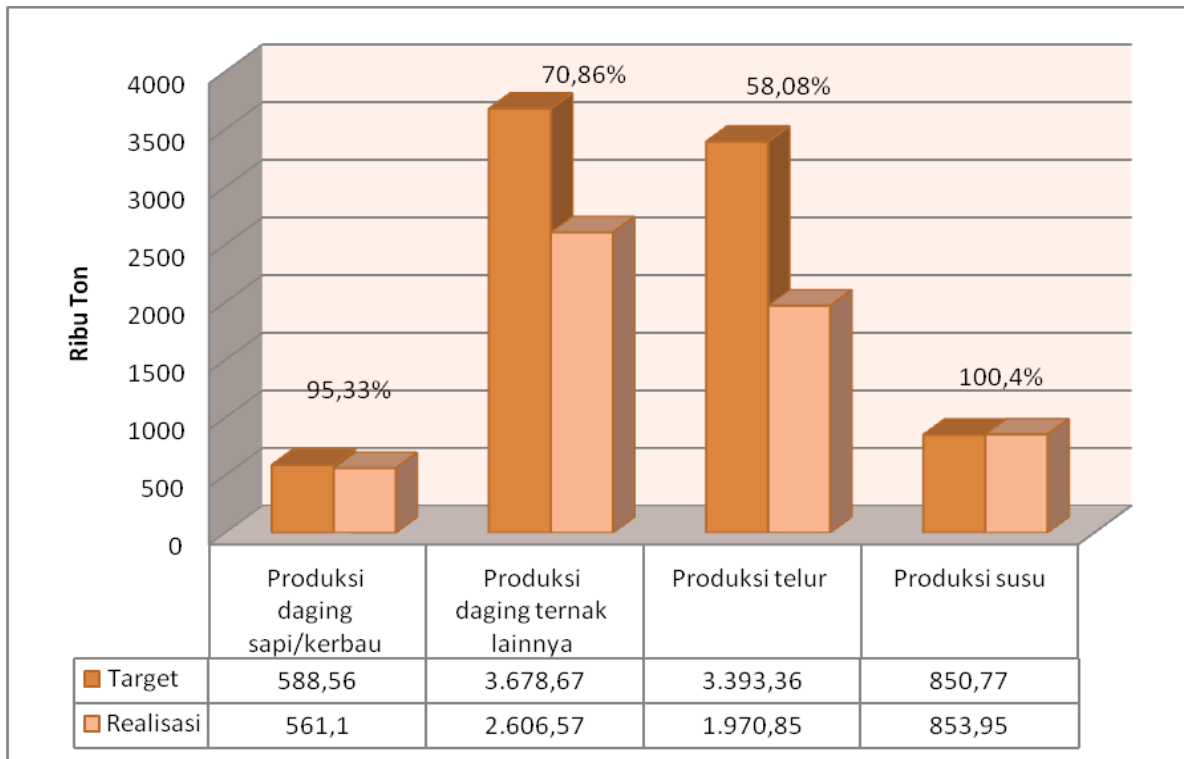
#### 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis.

##### 3.2.1 Pencapaian Sasaran Strategis

### SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN ASAL TERNAK

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis peningkatan produksi pangan asal ternak terdiri dari (1) produksi daging sapi dan kerbau; (2) produksi daging ternak lainnya; (3) produksi telur; dan (4) produksi susu. Capaian indikator kinerja sasaran strategis peningkatan produksi pangan asal ternak rata-rata 81,16% (berhasil). Capaian tertinggi pada indikator produksi susu (100,73%), sedangkan capaian terendah pada indikator produksi telur (58,08%). Rendahnya capaian produksi telur disebabkan karena penetapan target produksi telur dengan memperhatikan aspek kebutuhan DOC. Namun di dalam perhitungan realisasi produksi telur ayam ras oleh provinsi belum sepenuhnya menggambarkan jumlah produksi DOCnya, sehingga terdapat kesenjangan antara target dengan

capaiannya. Capaian indikator kinerja sasaran strategis peningkatan produksi pangan asal ternak selengkapnya disajikan pada Gambar 1

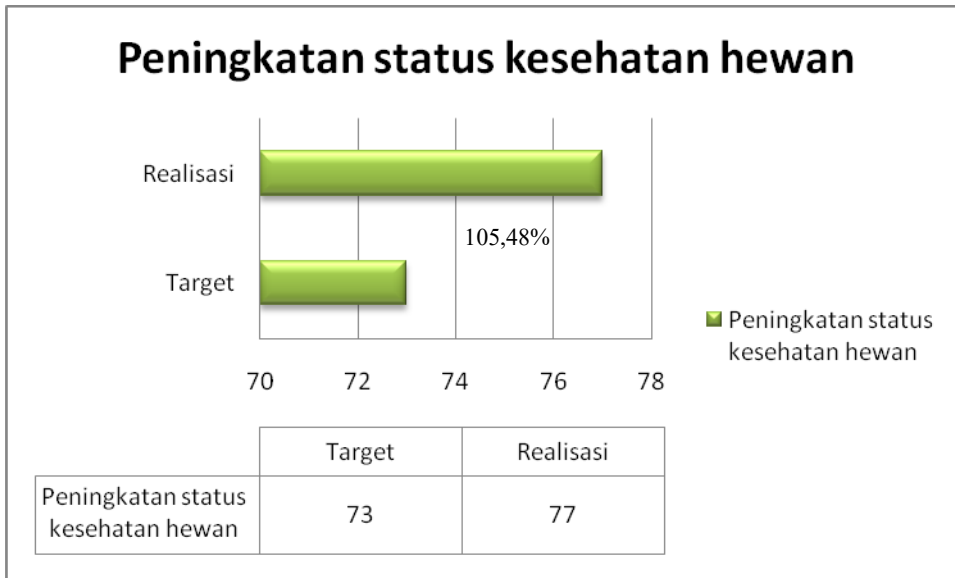


Sumber: Data Statistik Peternakan Tahun 2016

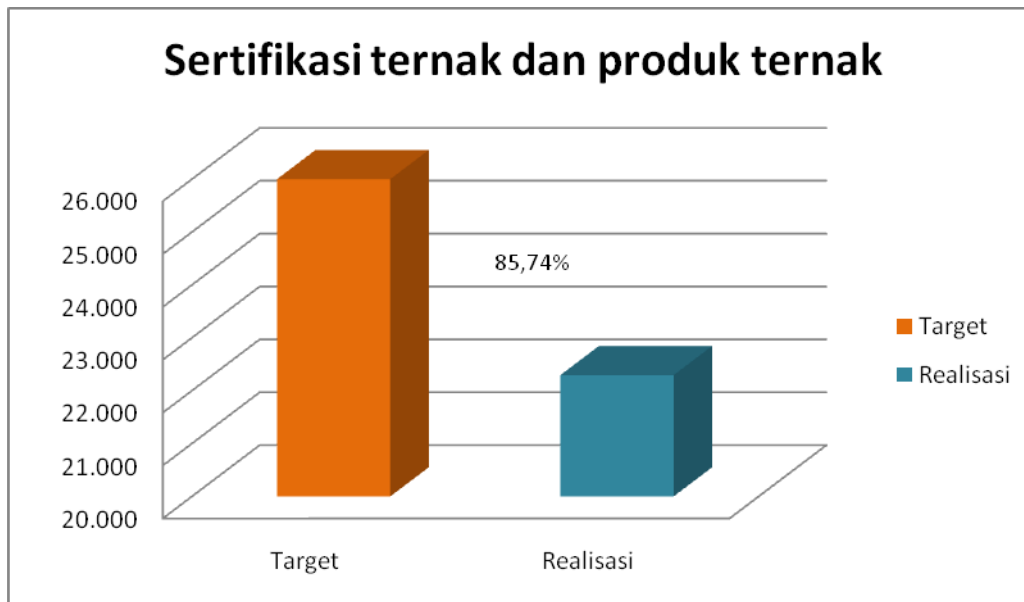
Gambar 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak Tahun 2016

## SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING PETERNAKAN

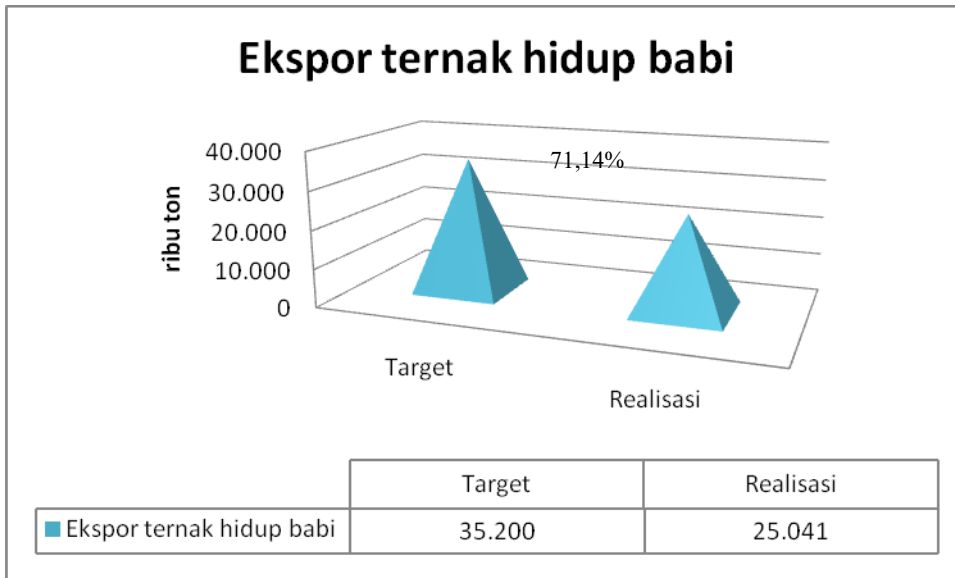
Sasaran strategis peningkatan daya saing terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu peningkatan status kesehatan hewan, jumlah sertifikat, dan ekspor ternak hidup babi. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ini rata-rata 87,43% (berhasil). Capaian indikator kinerja sasaran strategis peningkatan daya saing peternakan disajikan pada Gambar 2,3 dan 4.



Gambar 2 Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Status Kesehatan Hewan Tahun 2016



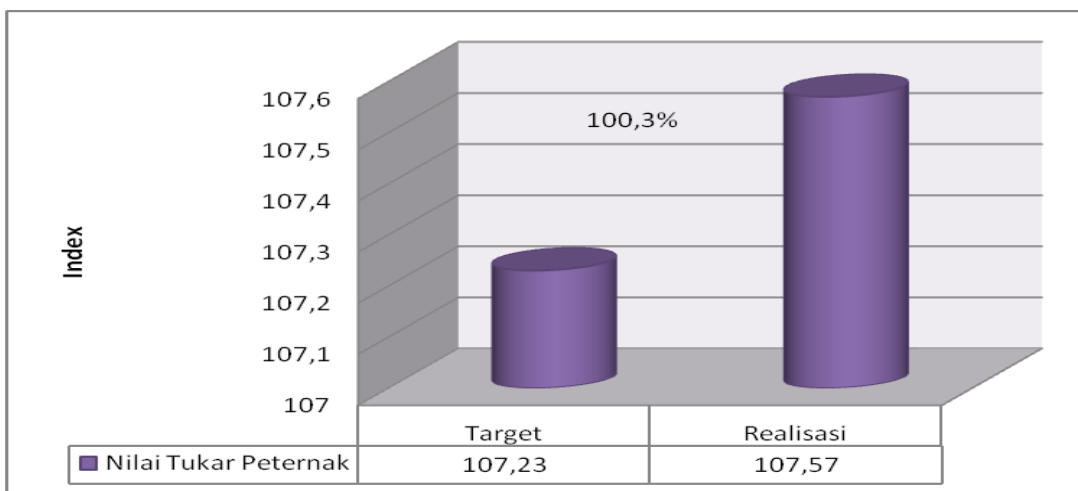
Gambar 3 Capaian Indikator Kinerja Sertifikasi Ternak dan Produk Ternak



Gambar 4 Capaian Indikator Kinerja Ekspor Ternak Babi Tahun 2016

## SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETERNAK

Capaian sasaran strategis peningkatan kesejahteraan peternak diukur melalui indikator kinerja Nilai Tukar Petani Peternak. Nilai NTPT tahun 2016 sebesar 107,57 atau mencapai 100,31% dari target 107,23. Capaian indikator kinerja sasaran strategis peningkatan kesejahteraan peternakan disajikan pada Gambar 5



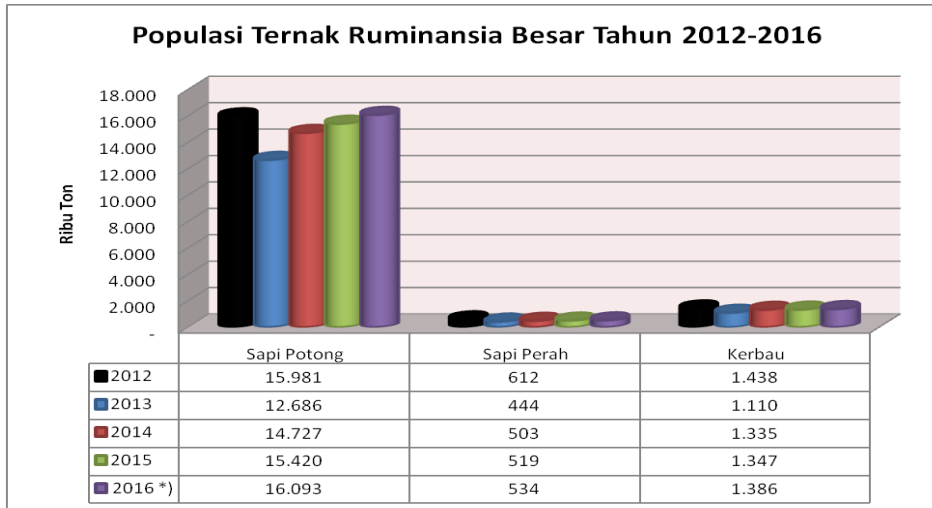
Sumber: BPS, 2016

Gambar 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Peternak Tahun 2016

### 3.2.2 Capaian Populasi Ternak

#### 3.2.2.1 Populasi Ternak Ruminansia Besar

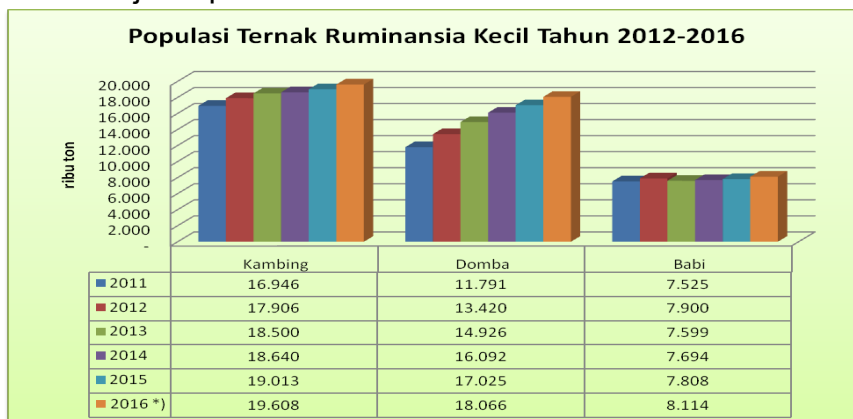
Populasi ternak sapi potong tahun 2012-2016 mengalami peningkatan rata-rata 1,13%. Sementara populasi sapi perah menurun sebesar 2,04%, dan kerbau meningkat 0,32%. Populasi ternak besar tahun 2015-2016 disajikan pada Gambar 6



Gambar 6 Populasi Ternak Ruminansia Besar Tahun 2012-2016

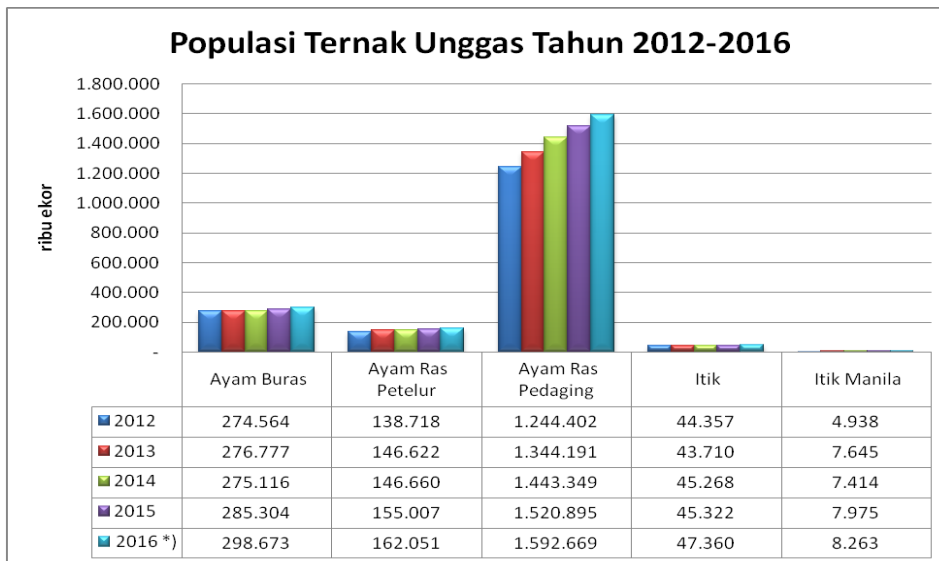
#### 3.2.2.2 Populasi Ternak Ruminansia Kecil

Populasi ternak ruminansia kecil mengalami peningkatan populasi pada kurun waktu 2012-2016. Peningkatan populasi ternak ruminansia kecil rata-rata 3,58%. Peningkatan populasi terbesar pada ternak domba sebesar 7,73%, diikuti ternak kambing 2,32% dan ternak babi 0,71%. Selengkapnya populasi ternak ruminansia kecil disajikan pada Gambar 7



Gambar 7 Populasi Ternak Ruminansia Kecil Tahun 2012-2016

Populasi ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 5,99% pada tahun 2012-2016. Peningkatan terbesar pada populasi ternak itik manila sebesar 15,74%, diikuti ayam ras pedaging 6,37%, ayam ras petelur 3,99%, ayam buras 2,15% dan Itik 1,68%. Populasi ternak unggas tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 8



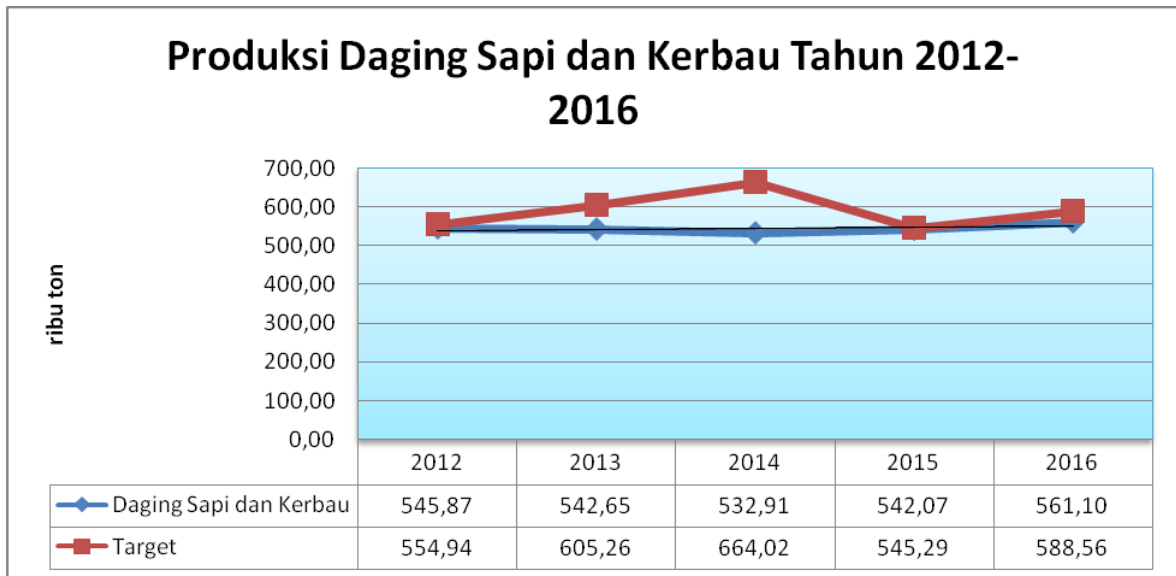
Gambar 8 Populasi Ternak Unggas Tahun 2012-2016

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 PRODUKSI DAGING SAPI DAN KERBAU

Produksi daging sapi/kerbau secara nasional tahun 2016 tercapai 561,1 ribu ton, meningkat 3,5 persen dari tahun 2015 sebesar 542,1 ribu ton. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra tahun 2016 sebesar 588,3 ribu ton, capaian produksi daging sapi/kerbau tahun 2016 mencapai 95,38% (berhasil). Dibandingkan target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2019 sebesar 755 ribu ton karkas, capaian produksi di tahun 2016 baru mencapai 74,30%.

Selama kurun waktu 2012-2016, capaian produksi daging menunjukkan trend positif, dengan peningkatan rata-rata 0,7% per tahun, seperti yang disajikan pada Gambar 9



Gambar 9. Trend produksi daging sapi dan kerbau tahun 2012-2016

Capaian tersebut, disebabkan adanya dukungan program dan kegiatan dalam periode 2012-2016 yang cukup berhasil antara lain melalui:

- 1 Produksi semen beku yang dilaksanakan oleh BBIB Singosari dan BIB Lembang sebesar 17,97 juta dosis.
- 2 Insentif penyelamatan sapi betina bunting 5.823 kelompok. Pada tahun 2015 kegiatan ini telah memberikan dampak peningkatan populasi sebanyak 7.985 ekor (jantan 1.940 ekor dan betina 3.009 ekor).
- 3 Peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau di UPT perbibitan 11.158 ekor.
- 4 Pengembangan integrasi tanaman-ruminansia di 1.247 kelompok, dengan jumlah ternak 19.871 ekor dan luas lahan yang ditanami HPT 22.280 Ha.
- 5 Penguatan pakan sapi penggemukan dan indukan yang baru dilaksanakan tahun 2015 pada 438 kelompok dengan jumlah pakan konsentrat 11.154 Ton.
- 6 Pengembangan hijauan pakan seluas 8.612 Ha, melalui kegiatan : 1) pengembangan hijauan pakan di UPT, UPTD dan kelompok; 2) penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas dan 3) pengembangan padang penggembalaan .
- 7 Peningkatan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR, yang dilaksanakan secara kontiniu, yang telah diikuti oleh 4.435 peserta. Pelatihan ini diikuti oleh 32 provinsi, yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu BBIB Singosari, BIB Lembang, BPTU-HPT Padang Mangatas dan BPTU HPT Sembawa. Khusus

tahun 2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga bekerjasama dengan Badan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR yaitu BBPKH Cinagara dan BBPP Batu.

- 8 Pengembangan usaha budidaya ternak sapi potong dan kerbau, pada 4.286 kelompok dari target 4.532 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 107.744 ekor di 32 Propinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak sapi; b) pengembangan budidaya ternak kerbau; c) pengembangan budidaya ternak sapi potong dan kerbau melalui Sarjana Membangun Desa (SMD); d) pengembangan budidaya ternak sapi potong dan kerbau melalui LM3; dan e) pengembangan sapi potong pada kegiatan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik).
- 9 Produksi embrio oleh Balai Embrio Ternak (BET) sebanyak 6.877 embrio.
- 10 Penyebaran pejantan InKA (Intensifikasi Kawin Alam) sapi potong dan kerbau, yang disebar sebanyak 12.512 ekor di 18 provinsi dalam kurun waktu 2010-2015. Kegiatan penyediaan pejantan InKa atau pemacek dilaksanakan pada wilayah yang pemeliharaan ternaknya belum intensif dengan tujuan penyebaran pejantan unggul untuk kawin alam dan perbaikan rasio antara jantan dan betina sejalan dengan perbaikan mutu genetik ternak.
- 11 Pengembangan indukan sapi, dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 2.470 ekor di Papua dan Papua Barat. Pengembangan indukan sapi di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi potong di wilayah Timur Indonesia, dengan indukan sapi potong lokal yang dikembangkan adalah sapi Bali. Pada tahun 2016, telah disebar sebanyak 4 ribu ekor indukan impor di 182 kelompok
- 12 Optimalisasi IB. Untuk mendukung kegiatan optimalisasi IB dilaksanakan melalui kegiatan reguler dan Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB). Kegiatan reguler optimalisasi IB meliputi sinkronisasi berahi, distribusi semen beku dan pengadaan N2 Cair. Sinkronisasi berahi realisasi tahun 2010-2015 dilaksanakan di 33 Propinsi dengan realisasi 184.664 dosis dari target 216.788 dosis. Distribusi semen beku realisasi tahun 2010-2015 sebesar 10.411.365 dosis dari target 14.728.210 dosis. Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan GBIB dengan target akseptor sebanyak 691.000 ekor dan realisasi 410.559 ekor. Optimalisasi IB Tahun 2016 sebesar 1.698.147 ekor atau 83,69% dari target sebesar 2.029.085 ekor.



- 13 Penanggulangan gangguan reproduksi pada 745 ribu ekor sapi/kerbau di seluruh Indonesia.
- 14 Penguatan kelembagaan kesehatan hewan melalui pembangunan 373 unit puskesmas untuk melengkapi 889 unit puskesmas yang sudah ada, sehingga total keseluruhan puskesmas saat ini 1.262 unit puskesmas yang tersebar di 421 kab/kota di seluruh provinsi.
- 15 Fasilitasi RPH di wilayah sentra produksi sapi dan kerbau melalui pembangunan 157 unit RPH, fasilitasi peralatan di 136 unit RPH dan revitalisasi 157 unit RPH. Jumlah seluruh RPH sampai saat ini 157 unit, tersebar di 27 provinsi untuk menyediakan daging yang ASUH. Tahun 2016, telah difasilitasi peralatan RPH sebanyak 1 unit.
- 16 Penjaminan daging sapi/kerbau yang ASUH di 149 unit usaha (RPH – R, UPD, Pengimpor, Distributor, Retail, Kios daging/hasil olahannya) melalui penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner
- 17 Fasilitasi kios daging 97 unit, untuk menjamin kualitas daging yang ASUH sampai ke konsumen. Jumlah kios daging sampai saat ini 97 unit di 30 provinsi

### 3.3.2 PRODUKSI DAGING TERNAK LAINNYA

Produksi daging ternak lainnya terdiri dari produksi daging kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Produksi daging ternak lainnya tahun 2016 mencapai 2,6 juta ton (dikurangi sapi dan kerbau), meningkat 3,9% dibanding tahun 2015 sebesar 2,5 juta ton. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2016 sebesar 3,6 juta ton, maka kinerja tahun 2016 sebesar 69,4% . Dibandingkan target produksi daging ternak lainnya di tahun 2019 sebesar 4,17 juta ton karkas, capaian produksi di tahun 2016 baru mencapai 59,95%.

Kontribusi produksi daging ternak lainnya terbesar bersumber dari ayam ras pedaging (65%). Sedangkan capaian produksi daging ayam ras pedaging tahun 2016 sebesar 61,9%, hal ini yang berpengaruh besar terhadap capaian produksi daging ternak lainnya.

Kondisi ini, kemungkinan disebabkan oleh perbaikan target produksi daging ayam ras pada tahun 2015 dengan memperhatikan aspek kebutuhan DOC. Hal ini

mengingat pada tahun-tahun sebelumnya produksi daging ayam ras yang dilaporkan tidak menggambarkan jumlah DOC yang diproduksi, serta kebutuhan pakan. Dengan perbaikan target produksi daging ayam ras pedaging tersebut, diharapkan ada sinergi dalam penghitungan supply demand daging ayam ras nasional, termasuk penghitungan kebutuhan pakan. Namun, di dalam penghitungan realisasi produksi daging ayam ras oleh propinsi belum sepenuhnya menggambarkan jumlah produksi DOC nya. Hal ini mungkin disebabkan, data/informasi produksi dan distribusi DOC oleh Breeder ke wilayah lain tidak/belum dilaporkan dengan baik kepada Dinas kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan di propinsi.

Peningkatan produksi tahun 2016 didukung oleh pertumbuhan produksi daging ternak kambing 2,8%, domba 8%, babi 3,7%, ayam buras 5,3%, ayam ras petelur 2,8%, ayam ras pedaging 3,7%, dan itik 4,3%. Produksi daging ternak lainnya disajikan pada Tabel 4

Tabel 4 Produksi daging ternak lainnya tahun 2015-2016

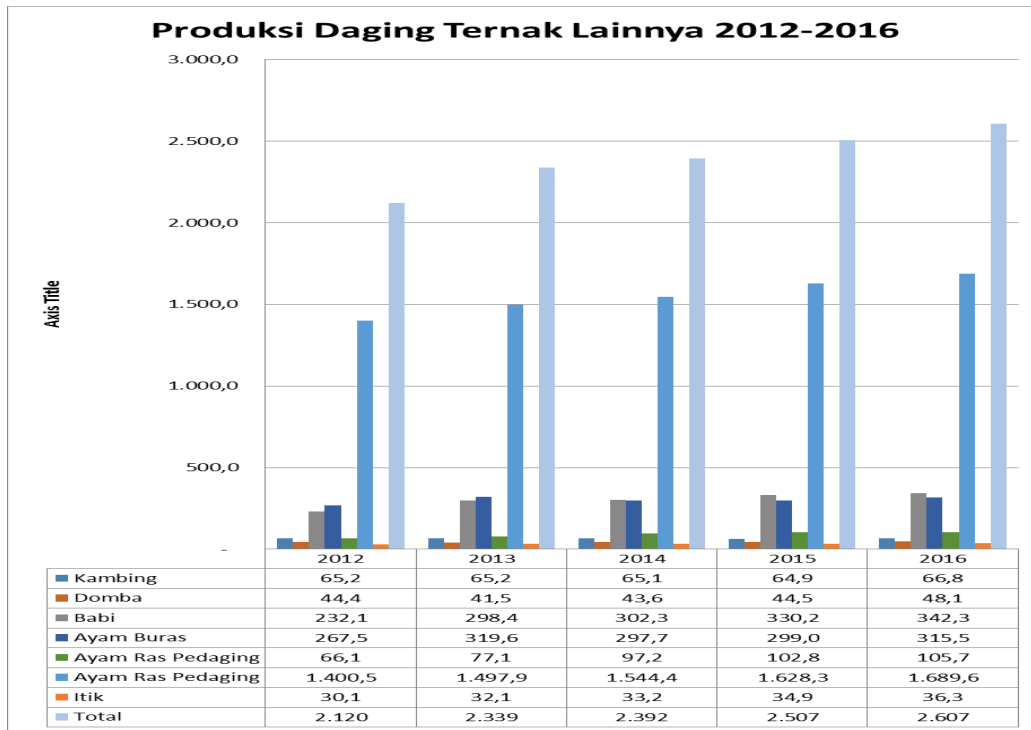
No	Komoditas	Produksi (000 Ton)			Capaian Produksi Tahun 2016 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2016 terhadap 2015
		2015	2016*			
			Target	Realisasi		
1	Kambing	64,9	66,71	66,8	100,13	2,93
2	Domba	44,5	50,26	48,1	95,70	8,09
3	Babi	330,2	354,76	342,3	96,49	3,66
4	Ayam Buras	299,8	330,67	315,5	95,41	5,24
5	Ayam Ras Petelur	102,8	108,65	105,7	97,28	2,82
6	Ayam Ras Pedaging	1.628,3	2.728,09	1.689,6	61,93	3,76
7	Itik	34,9	39,53	36,3	91,83	4,01
<b>Total</b>		<b>2.505,4</b>	<b>3.678,67</b>	<b>2.604,4</b>	<b>70,79</b>	3,95

Keterangan :

Sumber data Statistik Ditjen PKH 2016

\*= angka sementara

Selama kurun waktu 2012-2016, capaian produksi daging ternak lainnya menunjukkan trend peningkatan, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Trend Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2012-2016

Kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja produksi daging ternak lainnya 2012-2016 adalah:

- 1) Pengembangan usaha budidaya ternak kambing dan domba, pada 1.210 kelompok dari target 1.247 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 73.085 ekor di 18 Propinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak kambing; b) pengembangan budidaya ternak domba; c) dan pengembangan budidaya ternak kambing dan domba melalui SMD. Tahun 2016 pengembangan budidaya ternak kambing dan domba terealisasi 48 kelompok dari target 65 kelompok (73,84%)
- 2) Pengembangan usaha budidaya ayam lokal, selama kurun waktu 2010-2015 dilaksanakan pada 911 kelompok dari target 923 kelompok di 33 provinsi sebanyak 1.419.417 ekor, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya unggas lokal (ayam) di pedesaan (VPF); b) pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal (KAUL) (ayam); c) pengembangan unggas (ayam) di pemukiman; d) pengembangan zona perunggasan (ayam); e) pengembangan budidaya ayam lokal; dan f) pengembangan budidaya unggas lokal melalui SMD. Tujuan pengembangan usaha budidaya ayam lokal adalah untuk pembiakan dalam rangka *replacement* atau peremajaan ternak mendorong peningkatan produksi ternak. Tahun 2016 terealisasi kegiatan pengembangan budidaya unggas sebanyak 29 kelompok dari target 34 kelompok (85,29%)

- 3) Pengembangan usaha budidaya ternak babi, pada 287 kelompok dari target 292 kelompok dalam kurun waktu 2010-2015 di 10 provinsi sebanyak 10.329 ekor, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya babi; dan b) pengembangan budidaya babi ramah lingkungan. Tahun 2016 terealisasi 6 kelompok budidaya ternak babi dari target 11 kelompok (54,54%).
- 4) Pengembangan pakan olahan melalui kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas, Lumbung Pakan Unggas dan Revitalisasi UPP/LP/PPSK pada 263 kelompok.
- 5) Peningkatan kualitas bibit unggul kambing dan domba, ayam lokal, itik lokal, dan babi, masing-masing 85 klp (3.829 ekor); 59 klp (40.634 ekor); 55 klp (43.282 ekor); 19 klp (792 ekor). Tahun 2016 terealisasi 83 kelompok.
- 6) Pembebasan penyakit Hog Cholera di 18 kab/kota di provinsi Sumatera Barat serta Pengendalian dan penanggulangan di 8 propinsi sentra babi sebanyak 290 ribu ekor pada tahun 2015. Pada tahun 2016 belum ada tambahan wilayah bebas Hog Cholera
- 7) Pembebasan penyakit Avian Influenza (AI) secara kompartementalisasi pada 49 farm di 7 provinsi. Pada tahun 2016 sebanyak 21 (kabupaten/kota) yaitu Maluku Utara (10 kabupaten/kota) dan Maluku (11 kabupaten/kota) dari target 95 kabupaten/kota tercapai 22%. Untuk wilayah lain yang ditargetkan, saat ini masih dalam proses surveilans pembebasan yang dilaksanakan oleh BBVET/BVET.
- 8) Penjaminan daging unggas yang ASUH di 6 unit usaha (RPU, UPD, Distributor, Retail, Kios daging/hasil olahannya) melalui penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner
- 9) Fasilitasi RPB melalui pembangunan dan fasilitasi peralatan 5 unit RPB di provinsi Sulawesi Utara (menado), Kalimantan Barat (Singkawang), Papua (Timika), Sumatera Utara (Binjai) dan Kepulauan Riau.

### 3.3.3 PRODUKSI TELUR

Produksi telur secara nasional tahun 2016 sebesar 1,91 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 1,84 juta ton, maka produksinya meningkat 3,92%. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2016 sebesar 3,39 juta ton, maka capaian kinerjanya sebesar 56,42% .

Pada tahun 2015, Ditjen PKH memperbaiki target produksi telur dengan memperhatikan aspek kebutuhan DOC. Hal ini mengingat pada tahun-tahun sebelumnya produksi telur yang dilaporkan tidak menggambarkan jumlah DOC yang diproduksi, serta kebutuhan pakan. Dengan perbaikan target produksi telur tersebut, diharapkan ada sinergi dalam penghitungan supply demand telur ayam

ras nasional, termasuk penghitungan kebutuhan jagung (yang merupakan 40-60% komponen pakan). Namun, di dalam penghitungan realisasi produksi telur ayam ras oleh propinsi belum sepenuhnya menggambarkan jumlah produksi DOCnya. Hal ini mungkin disebabkan, data/informasi produksi dan distribusi DOC oleh Breeder ke wilayah lain tidak/belum dilaporkan dengan baik kepada Dinas kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan di propinsi.

Peningkatan produksi tahun 2016 didukung oleh pertumbuhan produksi telur ayam buras 2,83%, ayam ras petelur 4,04% dan itik 4,17%. seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Produksi telur tahun 2015-2016

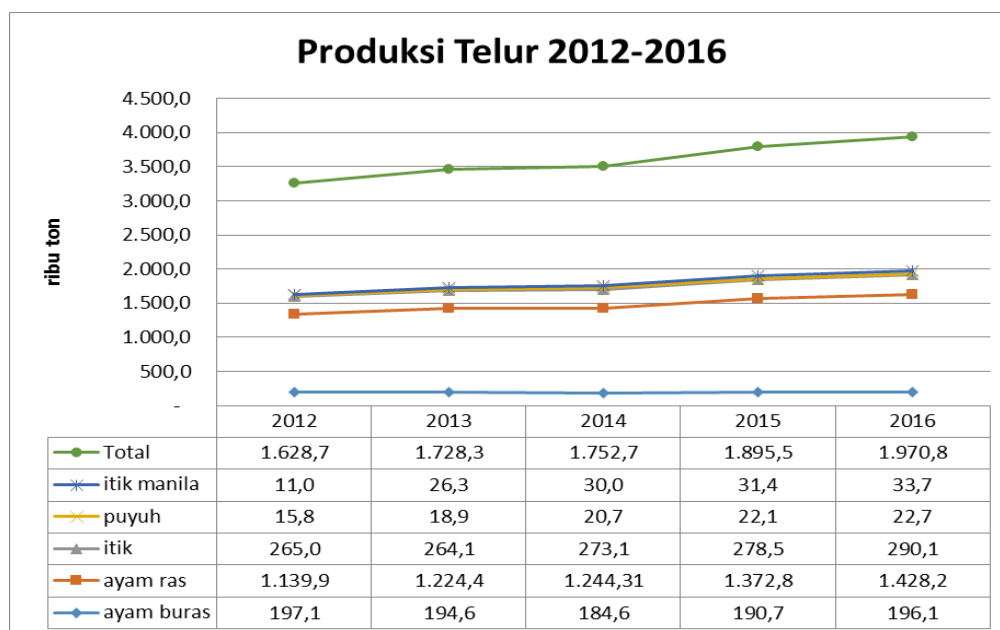
(000 ton)

No	Komoditas	Produksi			Capaian Produksi Tahun 2016 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2016 terhadap 2015
		2015	2016*			
			Target	Realisasi		
1	Ayam Buras	190,7	204,82	196,1	95,74	2,83
2	Ayam Ras Petelur	1.372,8	2.892,81	1.428,2	48,37	4,04
3	Itik	278,5	295,73	290,1	98,09	4,17
<b>Total</b>		<b>1.842,1</b>	<b>3.393,36</b>	<b>1.914,4</b>	<b>56,42</b>	<b>3,92</b>

**Keterangan :**

1. Sumber data Statistik Ditjen PKH 2016
2. \*= angka sementara

Selama kurun waktu 2011-2015, capaian produksi telur menunjukkan trend peningkatan, rata-rata 5,7% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Trend Produksi Telur Tahun 2012-2016

Kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja produksi telur 2012-2016 adalah :

- 1) Penguatan pembibitan unggas di 7 kabupaten terpilih di 6 provinsi.
- 2) Pengembangan usaha budidaya itik, dilaksanakan pada 365 kelompok di 32 provinsi sebanyak 671.720 ekor dalam kurun waktu 2010-2015, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya unggas lokal (itik) di pedesaan (VPF); b) pengembangan unggas (itik) di pemukiman; c) pengembangan zona perunggasan (itik); d) pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal (KAUL) (itik); e) pengembangan budidaya itik; f) pengembangan budidaya itik melalui LM3.
- 3) Pengembangan usaha budidaya puyuh, dilaksanakan pada 55 kelompok dari target 56 kelompok di 8 provinsi sebanyak 225.039 ekor.
- 4) Fasilitasi dan Revitalisasi UPP/LP/PPSK pada 29 kelompok
- 5) Pengujian Pullorum pada Parent Stock dengan jumlah hasil uji 101.888.
- 6) Pengujian salmonella pada produk telur konsumsi dengan jumlah sampel 1.416 (2013-2014) di seluruh Indonesia, yang hasilnya 99.85.% telah memenuhi SNI

### 3.3.4 PRODUKSI SUSU

Produksi susu nasional tahun 2016 (angka sementara) sebesar 853,0 ribu ton, jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 835,1 ribu ton, maka produksinya meningkat 2,14%. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2016 sebesar 850,7 ribu ton, maka capaian kinerjanya sebesar 100,2% .

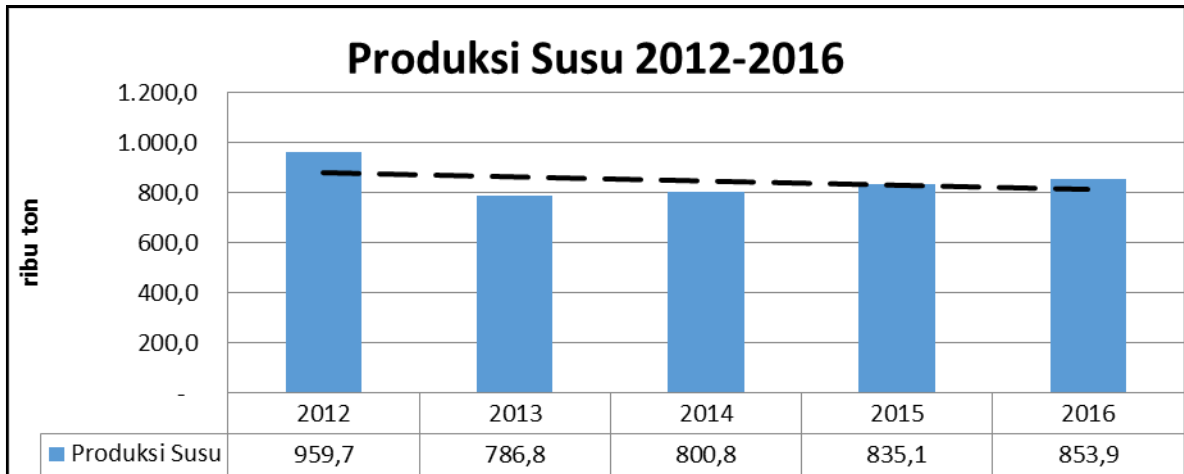
Tabel 6. Capaian produksi susu tahun 2015-2016

Komoditas	Produksi			Capaian Produksi Tahun 2016 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2016 terhadap 2015
	2015	2016*			
		Target	Realisasi		
Produksi Susu	835,1	850,77	853,0	100,26	2,14

Keterangan :

1. Sumber data Statistik Ditjen PKH 2016
2. \*= angka sementara

Selama kurun waktu 2012-2016, capaian produksi susu menunjukkan trend menurun, rata-rata 9,71% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Trend Produksi Susu Tahun 2012-2016

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pencapaian produksi susu yang dilaksanakan tahun 2012-2016 adalah :

- 1) Pengembangan usaha budidaya ternak sapi perah, dilaksanakan pada 455 kelompok dari target 462 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 9.022 ekor di 19 provinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak sapi perah; b) pengembangan budidaya ternak sapi perah melalui SMD; dan 3) pengembangan budidaya ternak sapi perah melalui LM3.
- 2) Pengembangan usaha budidaya ternak kambing perah, dilaksanakan pada 316 kelompok dari target 314 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 12.811 ekor di 15 provinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak kambing perah; dan b) pengembangan budidaya ternak sapi perah melalui LM3.
- 3) Pengembangan usaha budidaya kerbau perah baru dilaksanakan di 5 kelompok dari target 10 kelompok dengan realisasi 78 ekor di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
- 4) Fasilitasi Penerapan *Good Farming Practices* baru dilaksanakan pada tahun 2015 di 9 kelompok (11 provinsi dari target 14 provinsi), dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, rehabilitasi kandang, pengadaan milk can, pakan konsentrat, rekording ternak, workshop, apresiasi dan sekolah lapang. Tujuan dari fasilitasi penerapan GFP yaitu mendorong penerapan GFP yang baik ditingkat peternak, dengan fasilitasi sarana prasarana maupun pembinaan cara budidaya sapi perah yang baik.
- 5) Bantuan Penguatan Pakan Sapi Perah yang dilaksanakan selama tahun 2013 - 2015 di 654 kelompok atau setara dengan 14.715 Ton pakan

konsentrat sesuai SNI. Hasil evaluasi terakhir yang dilaksanakan tahun 2015, kegiatan ini telah dapat meningkatkan produksi susu rata-rata 2,12 liter/ekor, kenaikan kualitas susu (TS) 0,50% dan kenaikan pendapatan peternak Rp. 21,717 per orang/hari.

- 6) Selain Bantuan Penguatan Pakan Sapi Perah, kegiatan lain yang mendukung produksi susu adalah pengembangan hijauan pakan di UPT Pusat 181 Ha atau 1.810.000 Stek dan penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas sebanyak 122 Ha atau 1.220.000 stek.
- 7) Pembibitan sapi perah 55 kelompok dengan jumlah ternak 769 ekor.
- 8) Peningkatan kualitas bibit unggul sapi perah melalui kegiatan uji zuriat di 4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) telah menghasilkan pejantan unggul sebanyak 4 ekor *proven bull* ditahun 2011 dan 3 ekor ditahun 2015. Kegiatan tersebut dilakukan untuk replacement proven bull sapi perah dan peningkatan mutu genetik.
- 9) Penjaminan keamanan produk susu melalui penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner di 27 unit usaha.
- 10) Pengujian cemaran mikroba (2013-2014) pada susu sebanyak 2.030 sampel yang hasilnya 97.01 % telah memenuhi SNI, dan residu antibiotik (2013-2014) pada susu sebanyak 597 sampel, yang hasilnya 83 % telah memenuhi SNI

### 3.3.5 PENINGKATAN STATUS KESEHATAN HEWAN

Peningkatan status kesehatan hewan yang ditargetkan 73% terealisasi 76,57% (105,48%) yang tergambarkan dari keberhasilan pengendalian dan penanggulangan serta pembebasan PHMS prioritas Brucellosis, Rabies, Avian Influenza (AI) dan Hog Cholera. Sedangkan untuk Anthrax dilakukan pengendalian penyakit.

Pada tahun 2016 peningkatan status kesehatan hewan dari target 73% tercapai 76,57% yang tergambarkan dari wilayah yang telah dibebaskan dari PHMSZ yang terdiri atas :

Wilayah bebas Rabies sebanyak 192 (provinsi/kabupaten/kota/pulau). Dimana pada tahun 2015 sebanyak 190 (provinsi/kabupaten/kota/pulau) telah dibebaskan



dan tahun 2016 sebanyak 2 pulau yaitu Pulau pisang dengan Kepmentan Nomor 368/Kpts/PK.320/6/2016 dan Pulau Weh (Kota Sabang) dengan Kepmentan Nomor 363/Kpts/PK.320/5/2016 dari target 193 kabupaten/kota tercapai 99,48%. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berstatus bebas historis, berdasarkan hasil surveilans yang ada telah direkomendasikan untuk mendapatkan surat keputusan Menteri Pertanian.

Pada tahun 2015, sebanyak 177 (provinsi/kabupaten/kota/pulau) yang dibebaskan Brucellosis. Untuk tahun 2016 wilayah bebas brucellosis mencapai 205 (provinsi/kabupaten/kota/pulau). Dari 205 yang dibebaskan adalah penambahan 28 Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Banten yang ditargetkan bebas pada tahun 2016 masih dalam melengkapi data surveilans. Target capaian pembebasan Brucellosis tahun 2016 sebesar 98.56% (target 2016 : 208 Kabupaten/Kota).

Wilayah tidak ada kasus Avian Influenza tahun 2015 sebanyak 9 (provinsi/kabupaten/kota/pulau) sedangkan tahun 2016 sebanyak 21 (kabupaten/kota) yaitu Maluku Utara (10 kabupaten/kota) dan Maluku (11 kabupaten/kota) dari target 95 kabupaten/kota tercapai 22%. Untuk wilayah lain yang ditargetkan, saat ini masih dalam proses surveilans pembebasan yang dilaksanakan oleh BBVET/BVET.

Pada tahun 2015 wilayah bebas Hog Cholera sebanyak 18 (provinsi/kabupaten/kota/pulau), sedangkan tahun 2016 belum ada penambahan wilayah bebas Hog Cholera.

Penyakit Anthrax hanya dapat dilakukan pengendalian, tidak dapat dilakukan pembebasan. Hal ini disebabkan karena bakteri anthrax apabila jatuh ke tanah akan berubah menjadi bentuk spora. Spora Anthrax ini dapat bertahan hidup sampai ratusan tahun lebih dan dapat menjadi sumber penularan penyakit baik kepada manusia maupun pada ternak. Daerah endemik anthrax pada 10 tahun terakhir yaitu Jambi, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat (Pulau Mentawai), Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Wilayah Pengendalian Anthrax pada tahun 2015 sebanyak 155 (provinsi/kabupaten/pulau) sedangkan tahun 2016 sebanyak 163

(kabupaten/kota) dengan wilayah tertular baru di provinsi Sulawesi Barat (1 kabupaten), Gorontalo (3 kabupaten/kota), Jawa Timur (2 kabupaten) dan Jawa Tengah (1 kabupaten) sehingga terjadi peningkatan 5% wilayah pengendalian anthrax dari tahun 2015. Wilayah pengendalian gangguan reproduksi tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 33 provinsi dari target 33 provinsi tercapai 100%.

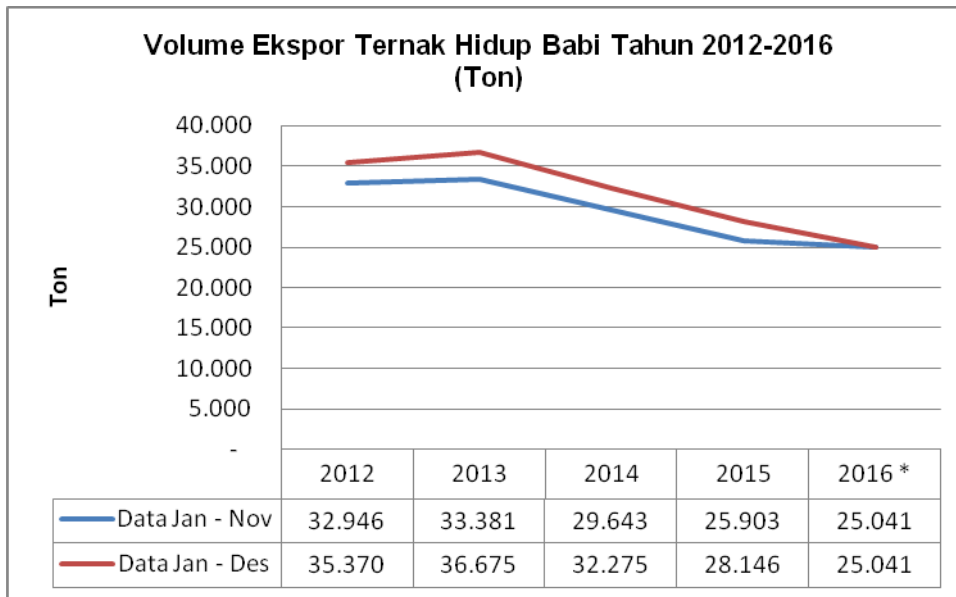
### 3.3.6 JUMLAH SERTIFIKAT

Peningkatan daya saing antara lain dapat diukur dari jumlah sertifikat bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diterbitkan. Pada tahun 2016 telah diterbitkan 22.293 sertifikat yang terdiri dari sertifikat bidang pakan, bidang kesehatan hewan, bidang perbibitan, dan bidang kesmavet. Jika dibandingkan dengan targetnya sebanyak 26.000, jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2016 baru mencapai 88,43% dari target.

### 3.3.7 EKSPOR TERNAK HIDUP BABI

Ekspor babi hidup merupakan ekspor hewan ternak yang terbanyak dibanding hewan ternak lainnya. Volume ekspor babi hidup tahun 2016 sampai dengan November 2016 sebesar 25.041 ton, menurun sebesar 3,33% dibanding periode yang sama tahun 2015 (28.146 ton). Singapura adalah pasar utama ekspor babi, karena warga Singapura lebih menyukai daging babi asal Indonesia ketimbang dari Eropa dan Brazil. Dengan harga daging babi kita yang lebih murah dibanding negara-negara Asia lainnya, tidak menutup kemungkinan bisa menembus pasar Eropa.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012 – 2016), volume ekspor ternak hidup babi menunjukkan trend menurun sebesar 6,46% per tahun. Menurunnya trend ekspor ternak hidup babi tersebut menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS disebabkan kecenderungan ekspor babi hidup masih fluktuatif, masih tergantung permintaan negara-negara sekitar kita terutama dari Singapura. Secara rinci perkembangan ekspor babi hidup tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 13 Trend Jumlah Ekspor Ternak Babi Tahun 2012-2016

### 3.3.8 NILAI TUKAR PETANI PETERNAK (NTPT)

Nilai tukar petani peternak merupakan indikator proxy kesejahteraan peternak. NTPT merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima peternak (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). NTPT tahun 2016 sebesar 107,57, menurun 0,11% dari tahun 2015 sebesar 107,69. Nilai NTPT > 100 berarti peternak mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. Peningkatan NTPT disebabkan oleh peningkatan IT lebih tinggi dibandingkan peningkatan IB.

Kegiatan yang mendukung peningkatan NTPT adalah: (1) Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan; (2) Pengembangan Peluang Investasi; (3) Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran; (4) Penguatan Kelembagaan.

Pengembangan pengolahan hasil peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta memperpanjang daya simpan produk peternakan. Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 66 unit usaha yang terdiri dari: 1) fasilitasi pengolahan susu sebanyak 15 unit di 14 kabupaten/kota di 6 provinsi; 2) fasilitasi pengolahan daging ruminansia sebanyak 13 unit di 13 kabupaten/kota di 11 provinsi; 3) fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk

cair sebanyak 20 unit di 17 kabupaten/kota di 12 provinsi; dan 4) fasilitasi pengolahan unggas dan aneka ternak sebanyak 18 unit di 17 kabupaten/kota di 9 provinsi.

Pengembangan peluang investasi merupakan kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan pengembangan usaha yang dilaksanakan pada 17 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, dan Gorontalo.

Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar peternak. Sarana dan kelembagaan pemasaran yang difasilitasi adalah pasar ternak dan Unit Pemasaran Poktan dan Gapoktan (UPPG). Tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 19 unit sarana kelembagaan pemasaran.

Penguatan kelembagaan peternak dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani peternak dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Koperasi-koperasi peternakan yang telah terbentuk kemudian dibina untuk mengembangkan diri menjadi lembaga peternak yang mandiri, serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial. Tahun 2016 telah difasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan di 18 provinsi. Dari fasilitasi tersebut telah terbentuk 9 koperasi di 4 provinsi.

### 3.3.9 KINERJA LAINNYA

#### 1. Perbaikan/Efisiensi Tata Niaga Sapi

##### a. Kapal Ternak

Menindaklanjuti rekomendasi Litbang KPK, telah dioperasikan Kapal Ternak yang difungsikan untuk mengangkut sapi dari provinsi NTT ke Jabodetabek. Penyediaan Kapal Khusus Ternak bertujuan untuk: (1) memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak; (2) mengubah struktur pasar sehingga terjadi peningkatan harga di tingkat peternakan dan penurunan harga daging di tingkat konsumen; (3) mengimplementasikan prinsip animal welfare dalam pengangkutan; (4) menghasilkan efisiensi distribusi ternak antar pulau; (5) memperbaiki tataniaga dan distribusi ternak sapi; (6) karena sapi yang diperdagangkan mulai dari peternak; (7) pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen mudah ditelusuri dan di catat; dan (8)

memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas.

Dengan pengoperasian kapal ternak harga daging sapi ditingkat konsumen diharapkan lebih terjangkau dan stabil sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1), dengan pelayaran perdana dari NTT ke Tanjung Priok pada tanggal 2 Februari 2016, mengangkut 353 ekor sapi. Pelayaran secara kontinu dilakukan setiap 2 minggu sekali, sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 telah dilaksanakan 24 pelayaran.

### **b. Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi Tahun 2016**

Sesuai instruksi Presiden untuk menekan harga daging sapi di bawah Rp. 80.000,00/kg, khususnya menjelang bulan Puasa dan Lebaran tahun 2016, dilaksanakan upaya stabilisasi pasokan dan harga daging sapi melalui Operasi Pasar (OP).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga daging sapi tahun 2016 adalah:

- (1) Penugasan khusus kepada PT Berdikari untuk dapat menjual daging, berupa daging beku impor dari Australia dengan harga Rp.70.000 – Rp.75.000 /kg.
- (2) Izin impor kepada 12 perusahaan swasta untuk mengimpor sapi dan sebanyak 6.600 ton menjelang Lebaran 2016 dan menjualnya melalui OP dengan harga Rp 80.000/kg
- (3) Menambah pasokan daging impor dari negara India berupa 80.000 ton daging kerbau beku oleh BULOG, dan terealisasi sebesar 49.548 ton (61,94%)

## **2. Iklim Usaha Sapi Potong**

### **a. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)**

Asuransi Usaha Ternak Sapi bertujuan untuk mengatasi resiko pada usaha peternakan sapi seperti kematian sapi, kehilangan sapi dan fluktuasi harga. Sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi asuransi ternak sapi dengan premi swadana mencapai 396 ekor dan APBD (provinsi Bali) sebanyak 1.743 ekor. Penerapan asuransi ternak ini masih menghadapi berbagai kendala antara lain

adalah pembayaran premi yang dirasakan berat oleh para pelaku usaha karena menambah beban biaya produksi.

Untuk itu pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) mengalokasikan subsidi pembayaran premi dengan target calon peserta asuransi bersubsidi sebanyak 120.000 ekor. Dengan perhitungan : beban premi sebesar 2% dari harga pertanggungansan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10 juta/ekor, dan rencana pembebanan pembayaran premi sebesar 80% oleh pemerintah (sisanya sebesar 20% ditanggung peternak). Ditjen PKH pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi AUTS pada 22 provinsi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini telah mengalami beberapa kali perubahan target peserta AUTS yaitu : 1) melalui prognosa PT Jasindo Nomor 044/DOR/IX/2016 tanggal 23 September 2016 target peserta menjadi 69.116 ekor dari 120.000 ekor; 2) melalui Addendum I PKS antara Direktorat Jenderal PSP dengan PT Jasindo Nomor 122/PSP/PK.ADDM.AUTS/11/2016 tanggal 7 November 2016 target pembiayaan subsidi premi AUTS tahun 2016 menjadi 20.000 ekor sapi.

Sampai dengan Desember 2016, polis yang telah diterbitkan oleh PT. Jasindo berdasarkan pengajuan Daftar Peserta Defenitif (DPD) kepada Direktorat Jenderal PKH dan telah ditindaklanjuti dengan Surat DPD ke Direktorat Jenderal PSP sebanyak 30.374 ekor sapi. Jumlah tersebut diakses oleh 18 provinsi dengan rincian Provinsi Jawa Timur 11.185 ekor, Provinsi Jawa Tengah 2.934 ekor, Provinsi Jawa Barat 1.527 ekor, Provinsi DIY 896 ekor, Provinsi Aceh 839 ekor, Provinsi Sumatera Utara 1.700 ekor, Provinsi Sumatera Barat 1.093 ekor, Provinsi Sumatera Selatan 425 ekor, Provinsi Lampung 1.204 ekor, Provinsi Bali 981 ekor, Provinsi Sulawesi Selatan 4.322 ekor, Provinsi Gorontalo 182 ekor, Provinsi Bangka Belitung 135 ekor, Provinsi Kalimantan Selatan 86 ekor, Provinsi Kalimantan Timur 1.365 ekor, Provinsi NTB 927 ekor, Provinsi Banten 362 ekor, dan Provinsi Sulawesi Barat 211 ekor. Tahun 2016 jumlah klaim yang terjadi sebanyak 54 ekor dengan rincian klaim 42 karena mati dan 12 karena hilang dengan presentase klaim tertinggi ada di Sumatera Utara dan diikuti NTB.

Kendala dalam pelaksanaan AUTS tahun 2016 adalah : 1) Sosialisasi subsidi bantuan premi dimulai pada pertengahan tahun, sehingga hasil masih belum optimal; 2) peserta asuransi ternak dengan dana premi swadana menjadi untuk induk tidak menarik lagi semenjak adanya subsidi premi; 3) SDM baik di

PT Jasindo sebagai pelaksana maupun di Dinas Kab/Kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan masih belum memadai, sehingga capaian target susah dicapai.

**b. Permentan 49/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia**

Dalam memenuhi ketersediaan daging, mempercepat peningkatan populasi serta optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai perubahan dari Permentan Nomor 16 Tahun 2016. Dalam Permentan tersebut diatur bahwa dalam pemasukan bakalan harus mencantumkan jumlah indukan dan bakalan dengan rasio perbandingan:

- (1) Jumlah indukan dan bakalan minimal 1:5 ekor, bagi pelaku usaha;
- (2) Jumlah indukan dan bakalan minimal 1:10 ekor, bagi Koperasi Peternakan dan Kelompok Peternak

**3. Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab)**

Upsus Siwab merupakan program peningkatan produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri dengan menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Dengan upaya khusus ini sapi dan kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan. Upsus Siwab mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta kebuntingan.

Untuk mengawal pencapaian sasaran program, pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Selain itu, untuk mengawal operasionalisasinya di lapangan, telah diterbitkan: 1) Kepmentan Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016, tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting; 2) Kepmentan Nomor 7589/Kpts/F/10/2016, tentang Sekretariat Kelompok Kerja Upsus Siwab; dan 3) Kepmentan Nomor 8933/Kpts/OT.050/F/12/2016 tentang Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Keberhasilan Upsus Siwab mencapai target kebuntingan 3 juta ekor sangat ditentukan oleh enam aspek teknis dan manajemen. Kinerja pengelolaan

keenam aspek tersebut langsung berada di bawah tanggung jawab setiap pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan. Keenam aspek tersebut adalah:

- a. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat;
- b. Penanganan Gangguan Reproduksi;
- c. Produksi dan kecukupan semen beku standar SNI, serta ketersediaan dan kecukupan tenaga inseminator, PKB dan ATR yang kompeten, dan Introduksi IB di Wilayah Ekstensif;
- d. Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer ;
- e. Pengendalian Pematangan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH
- f. Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan Upsus Siwab

#### **4. Stabilisasi Supply Demand Ayam Ras**

##### **(1) Permentan 61/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras**

Permentan 61/2016 merupakan perubahan terhadap Permentan Nomor 26/2016. Permentan 61/2016 merupakan jawaban terhadap permasalahan perunggasan diantaranya terjadinya disparitas harga *livebird*, isu *over supply*, dan belum lengkapnya data perunggasan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap peternak, koperasi, atau peternak mandiri dengan tidak merugikan perusahaan. Dengan adanya perencanaan produksi nasional, Permentan 61/2016 dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Peran Pemerintah yang diamanatkan oleh Permentan 61/2016 adalah:

- 1) Pengawasan distribusi DOC 50% untuk peternak
- 2) Pengawasan pembangunan RPHU bagi pengusaha yang memproduksi *livebird* diatas 300.000 ekor/minggu
- 3) Melaksanakan sertifikasi benih dan bibit
- 4) Menganalisis Supply-Demand Ayam Ras

##### **(2) Ketersediaan Jagung untuk Pakan Ternak**

Sejak tahun 2015 Pemerintah mengurangi impor jagung untuk mengutamakan produksi dalam negeri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jagung merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan oleh pabrik pakan skala besar (anggota GPMT), peternak ayam mandiri (*self mixing*) dan oleh pabrik pakan UMKM (termasuk pabrik



pakan milik koperasi susu). Untuk menjamin ketersediaan jagung sebagai bahan pakan ternak, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penandatanganan MOU antara Mentan dengan GPMT (Asosiasi Pabrik Pakan Indonesia) dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Kepala Dinas Pertanian 33 Provinsi dengan manajemen pabrik pakan setempat untuk penyerapan hasil panen jagung petani. Diharapkan dengan pola kerjasama semacam ini ada kepastian produksi jagung petani dapat diserap oleh pabrik pakan dengan harga acuan Pemerintah sesuai Permendag 21/2016.
- 2) Pola kemitraan antara industri pakan ternak dengan petani jagung diwujudkan pada tahap pertama dengan mengembangkan jagung seluas 724 ribu hektar tersebar di 29 provinsi dengan tambahan anggaran Rp 1,2 triliun dengan target produksi 3,5 juta ton jagung kering pipil. Produksi ini akan diserap oleh GPMT dan Kementan menargetkan tahun 2017 tidak ada lagi impor jagung sebagai bahan pakan ternak.

Pola kemitraan ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dengan 29 Kepala Dinas Pertanian Provinsi bersepakat bahwa:

- (1) Pemerintah memfasilitasi sarana dan memberdayakan petani guna meningkatkan produksi jagung serta menerbitkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen.
- (2) GPMT bersama Dinas Pertanian Provinsi secara bersinergi melaksanakan program pengembangan produksi jagung yang diintegrasikan dengan industri pakan ternak secara berkelanjutan (jangka panjang).
- (3) GPMT bersama Industri Pakan Ternak berkewajiban membina petani jagung dan membeli produknya dengan harga yang layak.
- (4) MoU ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak dan berlaku sampai dengan bulan Oktober 2019.

- 3) Impor jagung yang dilaksanakan oleh Bulog

## **E. Manajemen**

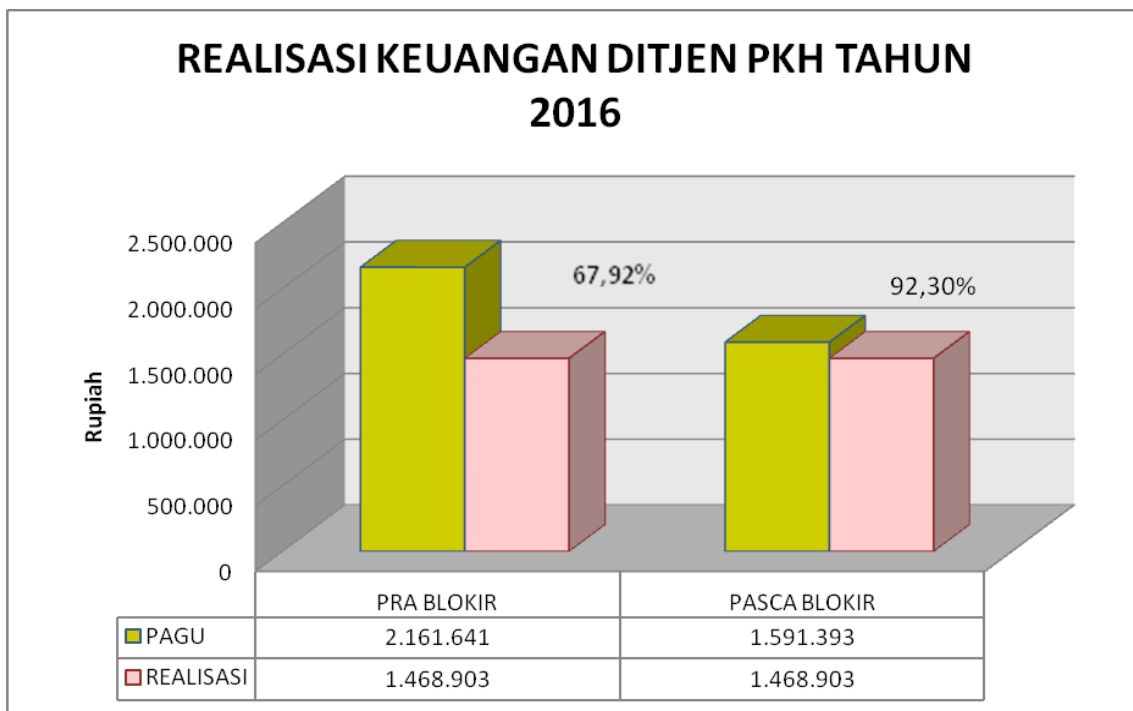
Pada tahun 2016 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima beberapa penghargaan dan apresiasi di bidang manajemen diantaranya:

- (1) Juara II Lomba Tertib Arsip antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
- (2) Juara II Lomba Website Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
- (3) Penerapan ISO 9001/2015 pertama di lingkup Kementerian/Lembaga
- (4) Nilai Indeks Kepuasan Konsumen A
- (5) Nilai Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja A

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

#### 3.4.1 Realisasi Keuangan

Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016 sebesar Rp 2,16 triliun, sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp 1,47 triliun atau 67,92%. Pada tahun 2016, anggaran Ditjen PKH mengalami self blocking sebesar Rp 570,25 miliar, sehingga jika dikurangi dengan jumlah self blocking realisasi keuangan Ditjen PKH sebesar 92,30%. Realisasi keuangan Ditjen PKH Tahun 2016 selengkapnya disajikan pada gambar 14.



Gambar 14 Realisasi Keuangan Ditjen PKH Tahun 2016

a. Realisasi Per Unit Kerja

Berdasarkan alokasi anggaran Unit Kerja realisasi anggarannya sebagai berikut: 1) Kantor Pusat sebesar 299,035 milyar atau tercapai 36,19% dari pagu Rp. 826,23 milyar, 2) Kantor daerah sebesar Rp. 483,89 milyar atau tercapai 89,92% dari pagu Rp.538,13 triliun, 3) Dekonsentrasi sebesar Rp. 223,16 milyar atau 92,10% dari pagu Rp. 242,31 milyar, 4) TP Provinsi sebesar Rp. 346,68 milyar atau 81,33% dari pagu Rp. 426,29 milyar, 5) TP Kabupaten sebesar Rp. 116,11 milyar atau 90,25% dari pagu Rp. 128,65 milyar.

b. Realisasi Per Jenis Belanja

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis belanja realisasi anggarannya sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai sebesar 97,33% atau Rp. 146,32 milyar dari pagu sebesar Rp. 150,33 milyar; 2) Belanja Barang sebesar 64,95% atau Rp. 1.23 triliun dari pagu sebesar Rp. 1,90 triliun; 3) Belanja Modal sebesar 79,54% atau Rp 88,41 milyar dari pagu sebesar Rp 111,15 milyar.

c. Realisasi Per Kegiatan Utama

Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terealisasi sebesar 50,38% atau Rp. 256,96 milyar; 2) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 91,78% atau Rp. 277,67 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit terealisasi sebesar 57,37% atau Rp. 523,18 milyar; 4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing terealisasi sebesar 92,67% atau Rp. 82,965 milyar; 5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terealisasi sebesar 92,51% atau Rp. 49,34 milyar; 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 94,75 % atau Rp. 278,76 milyar. Jika dikurangi dana blokir, Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terealisasi sebesar 92,42% atau Rp. 256,96 milyar; 2) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 92,91% atau Rp. 277,67 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit terealisasi sebesar 90,34% atau Rp. 523,18 milyar; 4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing terealisasi sebesar 93,97% atau Rp. 82,965 milyar; 5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terealisasi sebesar 93,37% atau Rp. 49,34 milyar; 6) Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 94,75 % atau Rp. 278,76 milyar

### 3.4.2 Evaluasi Kinerja Keuangan

Pada tahun 2016 terjadi dinamika dalam kebijakan anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun 2016 mengalami tiga kali penghematan anggaran. Pada akhir tahun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 700 juta yang merupakan pagu PNBP BIB Lembang. Kronologis perubahan anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 disajikan pada Tabel 10

Tabel 10 Kronologis Perubahan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016

Keterangan	Pagu Awal (Rp 000)	Pemotongan/ Self Blocking	Pagu Akhir (Rp 000)	Realokasi
Tahap I (Pemotongan)	2.806.126.308	645.185.000	2.160.941.308	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realokasi sebesar 154,81 M untuk pengembangan kambing, domba, kelinci, ayam kampung, UPTD Kerbau Rawa dan Rumah Sakit Hewan</li> <li>- Pengurangan Pengadaan indukan sapi impor semula 50.000 ekor menjadi 25.000 ekor</li> </ul>
Tahap II (Selfblocking)	2.160.941.308	521.048.650	1.639.892.658	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengadaan sapi indukan impor semula 25.000 ekor menjadi 4.550 ekor</li> <li>- Kegiatan pendukung pengadaan sapi indukan impor di satker daerah berupa pengadaan konsentrat, obat-obatan dan fasilitasi kandang</li> </ul>
Tahap III (Selfblocking)	1.639.892.658	49.199.415	1.590.693.243	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa-sisa tender sapi impor dan tender lainnya</li> <li>- Public awareness Kesmavet</li> <li>- Peralatan laboratorium autoclave Pusvetma</li> <li>- Pembangunan Kandang di UPT yang gagal lelang di BPTU HPT Sembawa</li> <li>- Pengadaan sapi brahman yang gagal lelang di BET Cipelang</li> <li>- Perjalanan dan pertemuan</li> <li>- Pengadaan sapi potong lokal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan</li> </ul>
Penambahan Pagu		700.000	1.591.393.243	Penambahan Pagu PNBP BIB Lembang

### **3.5. Hambatan dan Kendala**

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

1. Belum sinergisnya rancang bangun (pembagian kewenangan pengalokasian kegiatan dan anggaran) perencanaan pusat dan daerah (Bappenas-Bappeda, Antar Kementerian, dan Kementan-OPD);
2. Belum optimalnya dukungan sumber daya (SDM, Anggaran, Sarana prasarana: Puskesmas, Lab Keswan) dari pemerintah daerah dalam pemberantasan PHMS;
3. Dukungan pemda yang belum optimal dalam Penerapan Penjaminan Keamanan Produk Hewan yang ASUH. Belum seluruh daerah memiliki Peraturan Daerah tentang pelarangan pematangan betina produktif;
4. Sebagian besar produk pangan belum mempunyai ijin edar Makanan Dalam Negeri (MD) dari BPPOM terutama untuk produk susu dan olahan produk peternakan basah lainnya;
5. Dalam akses pembiayaan, penyerapan kredit usaha rakyat sektor peternakan masih rendah disebabkan Skema KUR belum mengakomodasi karakteristik usaha peternakan.
6. Kekurangan sumber air dan kesulitan dalam penyediaan lahan penanaman HPT dalam 1 hamparan

### **3.6. Upaya Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain:

1. Menyusun Rancang Bangun Pembangunan Peternakan berbasis Potensi Spesifik Daerah (pemanfaatan DAK sesuai ketentuan: misalnya RPH/Puskesmas/Lab/Pos IB dibangun oleh daerah DAK fasilitasi alat )
2. Tidak lanjut dalam rangka diversifikasi ekspor produk babi, Perusahaan di Pulau Bulan sedang dalam tahap pembangunan Rumah Potong Babi yang dilengkapi dengan *cold storage* sehingga ke depan diharapkan dapat memenuhi permintaan daging babi beku. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung dalam penjaminan keamanan produk hewan yang akan di ekspor.

3. Bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk memberikan kemudahan dalam perijinan penggunaan lahan untuk pengembangan peternakan yang salah satunya untuk pengembangan padang penggembalaan.

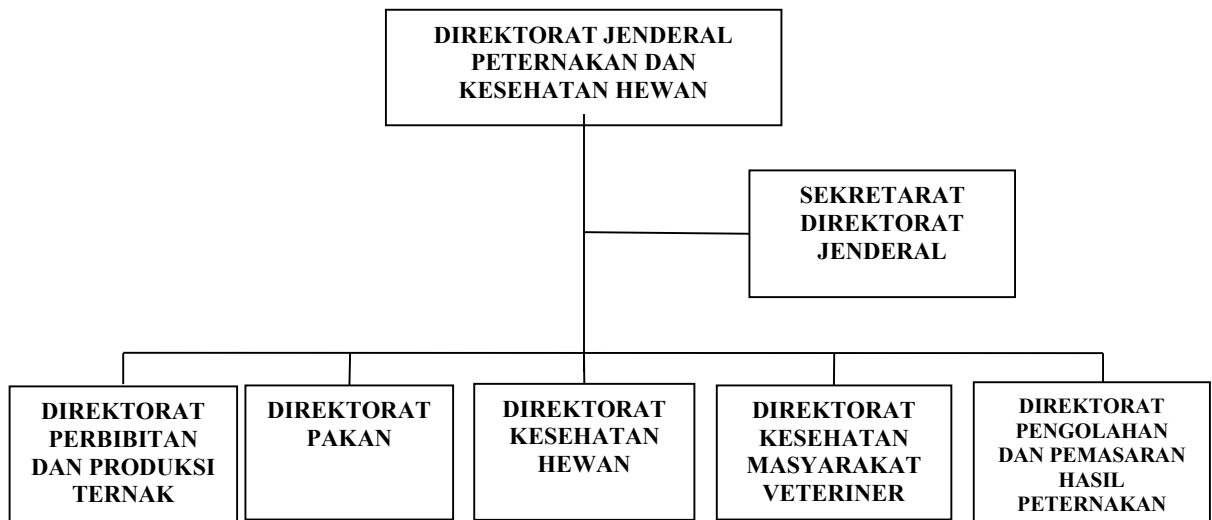
#### **IV. PENUTUP**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2016. Laporan kinerja ini menguraikan berbagai capaian sebagai wujud keberhasilan, disamping hambatan, kendala dan masalah yang dihadapi hingga penyebab kegagalan dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2016.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015)



Sumber : Dijen PKH



Lampiran 2. Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	2016	18	478	473	27	8	224	2	791	67	97	2.185
2	2015	20	479	471	21	10	233	2	847	75	113	2.271
3	2014	18	455	447	20	10	205	2	842	81	116	2.196
4	2013	15	458	421	17	12	184	2	844	87	120	2.160
5	2012	17	440	445	17	15	191	4	884	93	134	2.240
6	2011	17	460	461	13	19	192	4	944	97	154	2.361
7	2010	16	364	482	8	22	128	3	992	106	169	2.290

Sumber : Dijen PKH